



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

## PLN Tender Pipa Gas Muara Bekasi-Muara Tawar

JAKARTA – PT PLN menenderkan jasa pengadaan konstruksi (*engineering procurement construction/EPC*), untuk pembangunan pipa gas 7,2 kilometer (km) dari Muara Bekasi ke Muara Tawar, di Jawa Barat. Pemasukan dokumen (*bid submission*) akan dilakukan pada 13 Juli, dan September 2007 pembangunannya dilaksanakan.

Deputi Direktur Pembangkitan PLN Tonny Agus Mulyantono mengatakan, Rabu (4/7), pihaknya sudah mulai menjelaskan tender kepada 10 perusahaan calon peserta tender. "Investasi nanti berdasarkan harga tender terendah, investasi berasal dari Anggaran PLN (APLN) dan pipa ini merupakan milik PLN sendiri," jelas Tonny di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut Tonny, pembangunan pipa itu dilakukan, karena pipa dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (*South Sumatera to West Java/SSWJ*) hanya sampai ke Muara Bekasi. Karena itu, PLN harus membangun pipa gas sambungan untuk mengalirkan ke pembangkit di Muara Tawar.

PLN telah mengajukan perizinan kepada pemerintah untuk pembangunan pipa tersebut, baik ke Menteri ESDM maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pipa akan mengalirkan gas dari pipa SSWJ yang berasal dari PT PGN Tbk yang dibeli dari ConocoPhillips sebesar 40 juta kaki kubik per hari (*mile-mile*

*standard cubic feet per day/MMSCFD*), gas dari Amerada Hess sebesar 85 MMSCFD, gas dari Medco Energi sebesar 50 MMSCFD, dan gas dari PT Pertamina sebesar 100 MMSCFD. "Gas tersebut akan digunakan PLN untuk menambah kapasitas sejumlah pembangkit PLN," katanya.

Dia juga tetap optimistis, pihaknya bisa meremajakan dan menambah daya (*repowering*) tiga pembangkit hingga 900 MW, pada 2008. Ketiga pembangkit adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, PLTGU Muara Karang, dan Tanjung Priok.

### Izin Diproses

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menuturkan, izin pembangunan pipa milik PLN itu masih diproses. "PLN telah mengajukan izin kepada Menteri ESDM dan ditembuskan kepada kami. Karena ini untuk keperluan sendiri, jadi tidak perlu dikenakan biaya angkut," jelasnya.

Menurut dia, dengan memiliki pipa tersebut, BPH Migas berhak memungut iuran kepada PLN, berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Sesuai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2006 tentang Iuran BPH Migas, kami akan pungut iuran kepada PLN yang besarnya tergantung volume gas yang dialirkan," tegasnya. (ari)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    **JUL**    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

### Jababeka Akan Bangun Pembangkit Listrik

**P**T Jababeka Tbk berencana membangun pembangkit listrik (power plant) untuk kawasan industri Jababeka III senilai Rp1,1 triliun pada semester kedua 2007. Demikian diungkapkan Corporate Secretary Manager PT Jababeka Muljadi Suganda di Jakarta kemarin.

Menurut Muljadi, Jababeka sedang mencari dana sekitar Rp800 miliar untuk membiayai pembangkit tersebut. Selebihnya dari dana internal perusahaan. "Kami sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam negeri untuk mencari alternatif terbaik untuk pendanaan proyek tersebut," katanya se usai RUPS di Jakarta Rabu (4/7).

Pendanaan eksternal ini, menurut Muljadi, akan diperoleh dari beberapa sumber, seperti pinjaman bank dan penerbitan obligasi. "Kami masih menunggu lembaga keuangan yang sedang mengkaji sistem pendanaan yang sesuai," tuturnya.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007



**GRAND LAUNCHING** — General Manager PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Murtaqi Syamsuddin, Direktur Bisnis Komunikasi PT Pos Indonesia San Herib, Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Sunggu A Aritonang, dan Kepala Unit Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Ida Bagus Nurmantara (kiri ke kanan) bersama-sama memencet tombol dalam rangka grand launching pembayaran tagihan rekening listrik secara online di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/7). Transaksi pembayaran tagihan listrik bagi seluruh pelanggan listrik daerah Jawa Barat dan Banten itu dapat dilakukan di 390 Kantor Pos maupun di 37 mobil Pos Keliling Kota on-line atau e-mobile.

(Ant/Angger Bondan)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
HALAMAN : 7											TAHUN 2007

PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN

## PLN Salurkan Rp 300 Miliar untuk Comdev

JAKARTA (Suara Karya): Meski menanggung kerugian cukup besar akibat bencana yang melanda di Tanah Air, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menyalurkan bantuan pemberdayaan lingkungan sekitar (*community development/comdev*) sekitar Rp 300 miliar (2002-2007). Bantuan comdev itu termasuk untuk korban trsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan warga korban luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim Arief Hidayat, melihat kondisi korban bencana, termasuk di Sidoarjo, PLN khususnya Distribusi Jawa Timur merasa ikut prihatin. Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedu-

lian serta ikut membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana, PLN melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan.

Menurut dia, bantuan tersebut juga dilakukan berupa pelatihan ketrampilan untuk remaja dan warga Porong yang terkena dampak lumpur Sidoarjo. "Kami memberi kail untuk mencari ikan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan ketrampilan kepada warga Porong, sehingga mampu bangkit kembali dan mandiri," katanya. Pelatihan dilakukan di PLN Udiklat Pandaan dan Balai Latihan Kerja selama enam hari. Kegiatan ini diikuti oleh 108 orang peserta, terdiri

34 perempuan dan 74 laki-laki, mulai usia 15 tahun dan tertua 52 tahun.

Dia menambahkan, bentuk pelatihan meliputi kursus teknisi komputer, tata boga maupun busana, otomotif, lassery maupun gulung dinamo. Peserta memilih pelatihan otomotif sekitar 65 orang. Materi pelatihan sendiri sangat cocok untuk peserta dan mempunyai prospek yang bagus dalam dunia kerja.

"Semua biaya pelatihan ditanggung sepenuhnya oleh PLN. Hal ini merupakan bentuk CSR (*corporate social responsibility* atau pertanggungjawaban sosial) PLN terhadap lingkungan," kata dia. Dia juga berharap usai pelatihan peserta diberikan sertifikat keahlian dan peralatan untuk memudahkan mema-

suki dunia kerja.

Sementara itu, Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim mengatakan, bantuan yang disalurkan hingga mencapai Rp 300 miliar bagi korban bencana di Tanah Air ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat memulihkan kondisi seperti semula.

Bencana tersebut menyebabkan rumah penduduk, sawah ladang, fasilitas umum, jalan, jalan kereta, maupun aset PLN ikut menjadi korban. Akibatnya banyak orang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, putus sekolah, dan pengangguran. "Jadi merupakan tugas perusahaan untuk meringankan penderitaan para korban," katanya. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

PEMBANGKIT LISTRIK 10.000 MW

Pemerintah Tegaskan Investor Tidak Perlu Ragu

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menjamin PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 10.000 megawatt (MW). Untuk itu, konsorsium asing, terutama China, tidak perlu ragu untuk membantu pendanaannya.

"Sampai saat ini masih belum ada kesamaan persepsi antara PLN dengan salah satu konsorsium asing, yakni China. Wapres meminta agar terus dilakukan pendekatan," kata Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu usai rapat program percepatan pembangunan PLTU total kapasitas 10.000 MW yang dipimpin langsung Wapres Jusuf Kalla di Ja-

karta, Rabu (4/7).

Menurut dia, terdapat ada beberapa permasalahan yang masih mengganjal pelaksanaan proyek senilai sekitar Rp 200 triliun, terutama masalah penjaminan dan ketersediaan batu bara. Sebab, China hingga kini belum mau menyepakati kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam proyek itu sebelum ada jaminan dari pemerintah.

Padahal, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 beserta Peraturan Menteri Keuangan (PMK), lingkup penjaminannya sudah lengkap. Ini termasuk penjaminan kesehatan keuangan PLN dan penyediaan pasokan batu bara. Dan jika ada perubahan kebijakan yang mengakibatkan PLN tidak sehat, sepenuhnya

menjadi tanggungjawab pemerintah.

"Jadi, dengan jaminan itu seharusnya China tidak perlu ragu. Toh mekanisme hubungan antara pemerintah dan PLN sudah jelas. Kalau negara lain seperti Jepang sudah paham pola hubungannya, jadi gak ada masalah. Nah, bapak Wapres minta ini segera diselesaikan," katanya.

Pembiayaan proyek listrik 10.000 MW itu meliputi investasi untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi selama periode 2006-2010 sebesar Rp 170 triliun. Sekitar 56 persen dari jumlah itu ditujukan untuk pembangunan pembangkit. Investasi tersebut akan dibiayai dari pinjaman European Credit Agencies (ECA) sebesar Rp 79 triliun, penerbitan obligasi Rp 33 triliun dan dana

internal PLN Rp 59 triliun.

Tentang pembiayaan internal PLN dalam proyek itu, Anggito mengatakan, PLN mampu untuk melaksanakan proyek itu.

"Kan dia (PLN) memiliki obligasi rupiah dan valuta asing. Pemerintah juga sudah memberikan jaminan dalam bentuk *public services obligation* karena ada aturan Menteri Keuangan," ujarnya.

Selama ini, tercatat empat konsorsium yang telah menyatakan keinginannya untuk memberikan kredit ekspor, yakni China, Jerman, Jepang, dan Prancis. Dalam persyaratan pencairan kredit ekspor, negara-negara tersebut, terutama China, Jerman, dan Jepang, mengisyaratkan adanya jaminan dari pemerintah Republik Indonesia. (Abdul Choir/Antara)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2007

### Jababeka Bangun Power Plan Rp1,1 T

**JAKARTA (SINDO)**—PT Jababeka Tbk berencana membangun pembangkit tenaga listrik (power plan) berkapasitas 130 megawatt (MW) senilai Rp1,1 triliun. Dijadwalkan, pembangunan power plan bisa dimulai pada tahun ini.

"Kita akan membangun power plan dengan tujuan efisiensi. Kita harapkan secepatnya bisa dibangun," terang Corporate Secretary Manager Jababeka Muljadi Suganda di Jakarta, kemarin.

Menurut Muljadi, untuk memenuhi pendanaan sebesar Rp1,1 triliun itu, sebanyak 25% berasal dari dana internal dan 75% dicarikan alternatif pendanaan dari luar, antara lain melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi. "Bahkan bisa melalui *rights issue*," jelasnya.

Dia menambahkan, besaran dana yang dibutuhkan dari luar sebesar Rp800 miliar. "Kami sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam negeri untuk mencari alternatif terbaik untuk pendanaan proyek power plan itu," katanya.

Namun, Muljadi belum bersedia mengungkapkan alternatif pendanaan yang sudah diujicoba oleh perseroan. Menurut dia, hal itu masih dikaji oleh konsultan keuangan. "Kami masih menunggu lembaga keuangan yang sedang mengkaji sistem pendanaan yang sesuai," ujarnya.

Dia berharap, keputusan alternatif pendanaan sudah ada pada Agustus mendatang sehingga proyek pembangunan power plan bisa langsung dikerjakan. Saat ini, proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 130 MW ini sudah melalui tahap peninjauan pembelian mesin.

Tahun ini, perseroan menargetkan pendapatan naik 15-20% dibandingkan tahun 2006. Per 31 Desember 2006, Jababeka mencatat laba bersih Rp37,016 miliar (Rp2,69 per saham), menurun 72,37% dari tahun 2005 yang mencapai Rp133,990 miliar (Rp9,72 per saham). Penurunan laba bersih itu seiring penyusutan penjualan dan pendapatan jasa serta peningkatan jumlah beban usaha. (rakhmat baihaqi)

7

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>									
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<b>JUL</b>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30											
HALAMAN : 5											TAHUN 20

## Masyarakat Tuntut PT PLN Dihukum

**MEDAN** (SINDO) – Sidang gugatan *legal standing* Yayasan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) terhadap PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) diwarnai unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, kemarin. Massa yang tergabung dalam Aliansi Sumatera Utara menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap PLN akibat pemadaman listrik yang terus berlangsung.

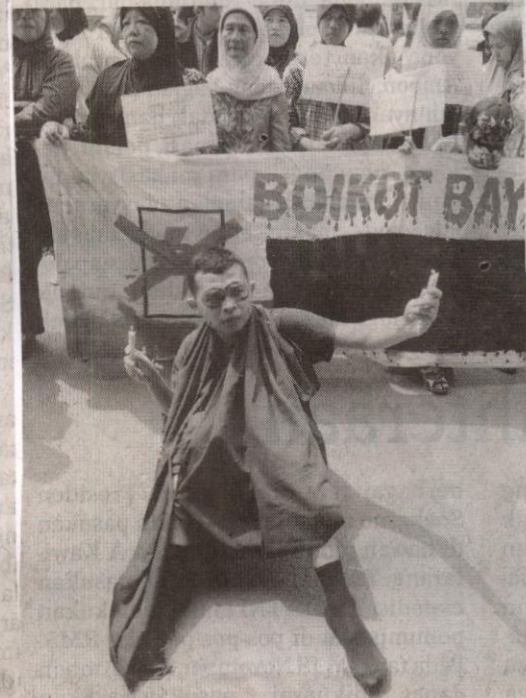
Unjuk rasa yang diikuti sejumlah siswa SD dan ibu rumah tangga diwarnai aksi teaterikal. Mereka mendesak majelis hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan kerugian besar yang dialami masyarakat sebagai dasar menjatuhkan hukuman terhadap PLN. "PLN harus dihukum berat," kata kordinator aksi M Nursaid dalam orasinya.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Medan Zulheri yang turut menyampaikan orasi mengatakan, majelis hakim harus mampu melihat kebenaran dalam gugatan ini. Dia mengimbau majelis hakim supaya menghindari konspirasi selama proses persidangan. Menurutnya, kegagalan PLN dalam mengelola listrik semakin jelas dengan kembalinya pemadaman sejak akhir Juni lalu.

Pada saat yang sama, di ruang sidang berlangsung penyerahan bukti-bukti alasan pemadaman yang dilakukan PLN. Kuasa hukum PLN, Martin, mengatakan, bukti-bukti yang diajukan, berupa surat-surat, perundang-undangan, dan sosialisasi pemadaman listrik terhadap masyarakat. "Kita menunjukkan bahwa pemadaman yang terjadi karena krisis

energi dan perbaikan mesin," kata Martin.

Kuasa hukum LAPK, Zulheri Sinaga, mempersoalkan bukti-bukti yang diajukan, apalagi menyangkut sosialisasi yang dilakukan lewat media massa. "Apakah masalah selesai jika sudah disosialisasikan. Ini tentu tidak menjawab masalah kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman," ujar Zulheri. **(yan muhardsyah)**



**BOIKOT PLN:** Puluhan massa dari Aliansi Sumatera Utara berunjuk rasa di depan PN Medan, kemarin.

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

### PLN Jatim bina remaja korban lumpur

PASURUAN: PT PLN Distribusi Jawa Timur memberikan pelatihan keterampilan bidang otomotif dan teknik komputer kepada 108 remaja korban semburan lumpur Lapindo yang merupakan bagian dari program bina lingkungan BUMN kelistrikan itu dengan alokasi dana Rp1,5 miliar tahun ini.

Ke-108 remaja tersebut adalah bagian dari 766 kepala keluarga atau 2.580 jiwa yang menghuni Pasar Baru Porong, Kab. Sidoarjo. Mereka menolak dipindahkan ke rumah kontrakan.

General Manager PT PLN Distribusi Jatim, Hariadi Sado, mengatakan kegiatan tersebut ditujukan terhadap korban semburan lumpur berusia produktif dengan jenis pelatihan yang prospektif memasuki dunia kerja.

"Ke depan diharapkan dapat dilakukan pelatihan lagi dengan jenis keterampilan sesuai kebutuhan PLN guna menghasilkan tenaga yang dapat diserap perusahaan jaringan listrik atau perusahaan jasa lainnya yang bermitra dengan kami," ujarnya di Pandaan, Kab. Pasuruan, kemarin.

Pelatihan akan berlangsung selama seminggu meliputi teknisi komputer, tata boga/busana, otomotif, yang diselenggarakan di Pandaan serta Bojonegoro. Para peserta se usai pelatihan tersebut akan diberikan sertifikat keahlian serta peralatan guna memasuki dunia kerja. (BISNIS/K22)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007



**PELATIHAN** - Direktur Transmisi & Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim menyerahkan bantuan kepada korban lumpur panas Lapindo yang menjadi peserta pelatihan di PLN Udiklat Pandaan, Jawa Timur, Rabu (4/7). Akibat luapan lumpur panas tersebut, hingga kini kerugian PLN mericapai Rp 13,275 miliar.

Investor Dailylist

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2007

**11.00 WIB**    **Jambi, Riau**

### Warga Halangi Pengerjaan PLTA

PEKERJAAN pemetaan tanah untuk lokasi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Kerinci berkapasitas 180 megawatt (Mw) terpaksa dihentikan karena warga memblokir lokasi tersebut.

Proyek yang baru dikerjakan perusahaan Bukaka Group sejak akhir Juni lalu itu terpaksa dihentikan karena warga menilai ganti rugi yang ditawarkan di bawah standar jual tanah setempat. Menurut warga setempat, lahan mereka hanya ditawar perusahaan dengan ganti rugi sebesar Rp10 juta per hektare (ha). Nilai itu jauh di bawah standar harga jual setempat yang mencapai Rp20 juta per ha.

Sebagai bentuk protes, warga memalangkan kayu di areal tanah milik mereka yang berada di jalur pemetaan di Desa Kalianggang, Kecamatan Batangmerangin, Kabupaten Kerinci. "Ini kan tidak sesuai. Padahal dalam sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah bersama pihak perusahaan, mereka berjanji ganti rugi akan disesuaikan dengan nilai jual objek pajak. Jadi, kami menolak karena tidak cocok dengan kesepakatan," ujar Muhammad Haviz, 47, warga Desa Kalianggang. (SL/N-4)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 200

PENJAMINAN

## Investor China Nilai Tawaran RI Belum Cukup

JAKARTA, KOMPAS — Masalah penjaminan Pemerintah Indonesia untuk proyek listrik berbahan bakar batu bara 10.000 megawatt masih menghadapi persoalan. Antara pihak China dan manajemen PT Perusahaan Listrik Negara belum mencapai pandangan yang sama soal penjaminan tersebut.

"Masalah itu masih dalam pendekatan dan penyamaan pandangan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu se usai mengikuti rapat terbatas mengenai masalah kelistrikan yang dipimpin Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Rabu (4/7).

"Wapres masih memberikan waktu untuk kita melakukan pendekatan agar ada kesamaan persepsi," ujar Anggito.

Hingga kini, lanjut dia, salah satu investor China belum mau menyetujui kontrak mengenai

rekayasa, tender, dan konstruksi proyek sebelum adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia yang mencakup keseluruhan proyek.

Padahal, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), lingkup penjaminannya sudah diatur secara lengkap, termasuk dalam hal kesehatan keuangan PLN dan penyediaan pasokan batu bara.

### Keraguan

Pengertian jaminan dari pemerintah, menurut Anggito, jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan PLN menjadi tidak sehat, maka hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

"Dengan jaminan seperti itu, seharusnya China tidak perlu ragu, mengingat mekanisme hubungan antara pemerintah dan PLN itu sudah jelas. Kalau negara lainnya seperti Jepang sudah lama dan pengalaman dalam pembangunan proyek pembangkit listrik, mereka sudah paham pola hubungannya seperti itu sehingga tidak ada masalah," katanya.

Dari segi keuangan, menurut Anggito, PLN bakal mampu mendanai proyek itu. "PLN memiliki obligasi rupiah dan valuta asing. Pemerintah pun sudah memberikan jaminan berupa Public Services Obligation. Jadi, sudah jelas," katanya. (HAR)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 22											TAHUN 2007

**Penambahan Pelanggan PLN Terkendala**

Penambahan pelanggan baru PT PLN (Persero) masih sulit direalisasikan meskipun permintaan dari masyarakat sangat tinggi. Hal itu akibat terbatasnya investasi jaringan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Menurut Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN Herman Darnel Ibrahim, Rabu (4/7) di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, sampai dengan akhir Juni 2007 realisasi penambahan pelanggan baru mencapai 45 persen. Padahal, untuk tahun ini pihaknya ditargetkan merealisasikan pemasangan baru kepada 1,4 juta pelanggan, belum termasuk calon pelanggan yang telah mendaftar pada tahun lalu yang jumlahnya 2,5 juta pelanggan. Tebatasnya alokasi anggaran yang dimiliki PLN mendorong mereka membatasi penambahan jaringan dan kapasitas pembangkit. Apalagi beban belanja operasional PLN bertambah sejak naiknya harga bahan bakar minyak yang mencapai 100 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Di sisi lain, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Untuk menambah 1,4 juta pelanggan baru, kata Herman, idealnya PLN menambah pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah sepanjang 10.000 kilometer dan jaringan distribusi tegangan rendah sepanjang 20.000 kilometer. (NIK)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

**Ristek jajaki energi arus laut**

MATARAM: Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) kini tengah menjajaki kemungkinan pengembangan energi listrik, dengan memanfaatkan kekuatan arus bawah laut yang ada di perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Bidang Program Menristek Bambang Setiadi mengatakan rencana penjajakan teknologi baru yang bernama Kobold tersebut telah dilaporkan dan mendapat dukungan gubernur.

Menurut dia, rencana pengembangan teknologi sumber daya arus bawah laut untuk energi listrik akan dilaksanakan di kawasan Selat Alas, Pringgabaya, Lombok Timur.

Posisi Selat Alas yang berada antara laut Pasifik dan India Selatan memiliki arus bawah laut cukup potensial untuk dijadikan sebagai sumber daya memutar turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. (ANTARA)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2007

## Keselamatan dan Keamanan PLTN Dapat Dijamin

**Jakarta** – Dengan sistem berlapis pada area reaktor dan penyimpanan limbah, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat dijamin faktor keamanan dan keselamatannya.

“Skenario terburuk dari PLTN, yaitu terjadinya ledakan, dapat diprediksi tahapan evakuasi hanya berjarak 200 meter dari titik ledakan,” urai Prof DR Sofyan Yatim, Ketua Bidang Lingkungan dan Keselamatan dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL), di Jakarta, Selasa (3/7). Radius di luar 200 meter dari titik ledakan menurutnya tak akan terpengaruh sama sekali.

Hal tersebut diungkapkannya, menanggapi beberapa pendapat masyarakat yang masih anti pada pembangunan PLTN di Muria, baru-baru ini. Pengalaman tersebut didapat melalui uji skenario terburuk yang pernah dilakukan Badan Tenaga Atom Nasional (Batn) pada stasiun nuklir yang berada di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong belum lama berselang. Dalam skenario tersebut, diasumsikan terdapat tiga reaktor nuklir yang meledak secara bersamaan karena adanya serangan udara.

“Dengan menerapkan sistem *emergency planning preparedness and response*, jumlah dan jenis radioaktif yang keluar dapat diprediksikan,” urainya. Dengan hitung-hitungan tersebut maka didapat hasil kalau standar prosedur keamanan dapat dijalankan dengan disiplin, efek dari nuklir dapat diminimalisasi dengan sempurna.

Standar prosedur keamanan itu sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu *stay in* (berlindung) pada kondisi reaktor terancam, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu shelter dimana



SH/Agung Prabowo

**ADANG PESERTA KONFERENSI** - Belasan aktivis Greenpeace melakukan unjuk rasa dengan tidur di jalan untuk mengadang para peserta Konferensi IndoNuclear 2007, di Hotel Sultan, Jakarta, 2 April 2007 lalu. Mereka menolak rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

penduduk mulai diungsikan dan dikumpulkan ke suatu tempat, hingga kemudian evakuasi yang merupakan tindakan paling terakhir dapat dilakukan. Sistem ini sendiri menurut Sofyan merupakan adaptasi dari standar internasional yang disetujui oleh International Atomic Energy Agency (IAEA).

Namun, menurut Sutaryo Supandi, salah seorang perintis industri nuklir di Indonesia, kejadian meledak pada sebuah reaktor nuklir merupakan kejadian yang mustahil. Karena geometri pada sistem reaktor nuklir tidaklah diperuntukan sebagai bahan peledak.

Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan energi nuklir dapat meledak, yaitu jumlah uranium dan plutonium yang teramat besar. Komposisi tertentu yang menyebabkan ledakan dan geometri yang menyebabkan.

“Sementara itu, desain PLTN yang ada tak akan membuat ledakan seperti yang ditakutkan,” paparnya, pada kesempatan yang sama.

### PLTN Muria

Menurut penjelasan Sofyan, setidaknya terdapat lima lapis pelindung pada desain reaktor yang akan di-

bangun di Muria. Pelindung pertama terdapat pada bahan bakar dengan menggunakan *crystal lattice*, pelindung kedua dengan menggunakan *cladding*, pelindung ketiga yang merupakan pelindung reaktor menggunakan sistem pendingin, pelindung keempat dengan *containment*, dan pelindung terakhir merupakan lapis baja dengan struktur khusus.

Sistem pertahanan berlapis juga dilakukan pada pembuangan akhir limbah PLTN. Dimana pada lapisan terluar terdapat hambatan alamiah, selanjutnya dan hambatan buatan, ditambah wadah pembungkus, selain itu juga ada bahan pengungkung dan matrik tambah sebagai lapisan awal pertahanan limbah.

Di lain pihak, Lilo Sunaryo PhD, dari Masyarakat Reksa Bumi (Marem) Jepara tetap menyatakan penolakan terhadap pembangunan PLTN di daerah mereka. Adanya unsur berlapis pada reaktor dan tempat limbah justru menurutnya menunjukkan betapa berbahayanya PLTN tersebut. "Kalau PLTN itu memang aman, lalu untuk apa dibuat pertahanan hingga berlapis-lapis seperti itu?", paparnya ketika dihubungi via telpon, Selasa (3/7) malam.

Hingga saat ini, mereka terus melakukan sosialisasi pada masyarakat, mengenai untung dan rugi adanya PLTN di daerah mereka.

PLTN sendiri sejauh ini terus berkembang keberadaannya di dunia. Semenjak kecelakaan Chernobyl yang terjadi tahun 1986 lalu, justru keberadaan PLTN makin bertambah secara kumulatif. Tercatat hingga tahun 1996 ada 438 jumlah PLTN di seluruh dunia, sementara tahun 2006 terus bertambah hingga mencapai 443 buah. (sulung p rasetyo)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

# Presiden Dukung Program Nuklir di Indonesia

SERPONG – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung program pengembangan nuklir untuk tujuan damai, menciptakan pembangkit energi, meningkatkan kesehatan, dan untuk mendukung teknologi pertanian. Untuk itu, Presiden menantang para peneliti dalam negeri mengembangkan teknologi nuklir yang bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa.

“Pembangunan teknologi nuklir harus fokus pada penciptaan energi, kesehatan, dan untuk meningkatkan kebutuhan pangan,” kata Kepala Negara dalam kunjungan kerjanya ke Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan (Puspiptek) di Serpong, Banten, Rabu (4/7).

Pada kunjungan tersebut, Presiden didampingi ibu negara, Ani Yudhoyono, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Kepala Batan Hudi Hastowo.

Presiden meminta kepada para peneliti untuk menciptakan terobosan baru melalui pemanfaatan teknologi nuklir sehingga bisa dinikmati generasi mendatang. “Mari kita ubah negeri kita. Kita jadi bangsa yang hemat. Ingat, saat ini kita telah memasuki gelombang keempat peradaban dunia,” ujar dia.

Ia mengatakan, sebagai bangsa yang besar Indonesia harus mampu menyejajarkan diri dengan negara lain dalam pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia telah terlebih dulu mengembangkan teknologi nuklir, tetapi terbengkalai

seiring berbagai kemelut yang dihadapi bangsa ini.

“Kalau Thailand bisa, kalau India bisa, Indonesia juga harus bisa. Kita harus mengubah kompleksitas dunia menjadi kesejahteraan,” kata Presiden.

Indonesia harus melakukan terobosan teknologi, penelitian dan pengembangan di berbagai bidang, terutama pangan, energi, air, dan obat-obatan. Terobosan teknologi itu diharapkan bisa menyelamatkan kehidupan bangsa di masa mendatang. Ia juga menantang para peneliti untuk mengembangkan teknologi yang bisa mendeteksi gempa dan tsunami, serta obat-obatan atau virus untuk flu burung dan HIV-AIDS.

Presiden menyambut gembira upaya yang sudah dilakukan para peneliti di Batan, antara lain pengembangan di bidang ketahanan pangan, seperti pengembangan varietas unggul padi, pangan ternak, dan kesehatan.

Presiden yakin, peradaban akan terus berubah dan tidak ada masa depan tanpa teknologi. Karena itu pemerintah selalu memberikan apresiasi dan dukungan bagi para peneliti untuk terus berinovasi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-

negara lain. “Mari kita mulai dari sekarang,” kata SBY.

Sementara itu Kepala Batan Hudi Hastowo mengatakan, teknologi nuklir yang dikembangkan di Indonesia hanya untuk tujuan damai. Visi ke depan Batan adalah antara lain mewujudkan iptek nuklir untuk pengembangan di berbagai bidang kehidupan, seperti pangan dan kesehatan.

Sehari sebelumnya, diskusi tentang Masalah Kebocoran dan Kemungkinan Meledaknya PLTN Nuklir digelar. Pakar pengolahan limbah nuklir dari Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) Sofyan Yatim mengatakan, secara teknologi, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang saat ini dikembangkan di berbagai belahan dunia, termasuk yang akan dibangun di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, tidak menghasilkan limbah radioaktif berbahaya. Teknologi pengolahan limbah nuklir yang dikembangkan dan diterapkan di beberapa negara, termasuk di Asia sudah sangat maju dan dinyatakan aman.

Menurut Sofyan, teknologi pengolahan limbah nuklir telah mengikuti panduan internasional, baik merujuk *basic safety standard radiation* dari International Atomic Energy Agency (IAEA) maupun Weste Advisory Safety Standard Committee (WASSC). Selain itu juga ada International Convention on the Safe Management of Radioactive Waste and Spant Fuel.

“Lembaga-lembaga ini juga akan selalu memonitor setiap rencana pemanfaatan tenaga nuklir oleh suatu negara,” kata Sofyan yang juga mantan kepala

Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif Batan. (*Investor Daily*, Rabu 4/7).

Sedangkan pakar nuklir yang juga Ketua MPEL Budi Sudarsono menambahkan, industri nuklir merupakan satu-satunya yang mewajibkan pengelolaan seluruh limbah dan mendapatkan pengawasan internasional. Selain itu, studi Eropa juga telah mengakui bahwa energi nuklir merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan dari semua segi. Bahkan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang dihasilkan mendekati 0%.

"Jadi sebenarnya, jika energi nuklir dikembangkan secara optimal, akan sangat membantu program pencegahan pemanasan global (*global warming*)," ujar mantan deputi Batan itu.

Lebih lagi, dari segi biaya produksi, energi nuklir ternyata sangat rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, gas atau bahan bakar minyak (BBM).

Untuk menghasilkan satu kilowatt (kWh) listrik, biaya produksi yang harus menggunakan energi nuklir hanya US\$ 1,72 sen. Biaya produksi untuk pembangkit berbahan bakar batubara mencapai US\$ 2,2 sen per kWh, gas (US\$ 7,57 sen), dan solar (US\$ 8,08 sen).

Lebih jauh dia juga menegaskan, kemungkinan meledaknya reaktor PLTN sangat kecil. Pasalnya PLTN yang saat ini dikembangkan di berbagai belahan dunia sudah sangat berbeda dengan PLTN di masa lalu, seperti yang dikembangkan Uni Soviet di Chernobyl. "Reaktor yang dikembangkan di Chernobyl itu tipe RBMK, yang memang tidak aman," tukas Budi. (nov)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

**KRISIS LISTRIK**

## Inalum Wajib Pasok 90-100 MW untuk Sumut

MEDAN (Suara Karya): PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) harus memberikan pasokan listrik 90-100 megawatt (MW) per hari untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui PLN Distribusi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Langkah ini merupakan solusi paling cepat mengatasi sebagian krisis listrik di Sumut yang sudah mencapai 300 MW di waktu beban puncak (WBP) antara pukul 19.00 sampai 23.00 WIB. Saat ini masyarakat harus mendapat giliran pemadaman listrik setiap hari karena kekurangan pasokan tersebut.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Sumut Washington Tambunan dalam pertemuan di Aula Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut di Medan, Rabu (4/7). "Kita sedang berupaya mencari cara mendesak Inalum memberikan energi listrik 90-100 MW per hari ke Sumut," kata Washington.

Menurut dia, upaya mendesak Inalum itu tidak lagi memakai mekanisme barter energi atau sistem pengalihan (Swap), seperti yang selama ini diterapkan antara Inalum dan PLN Sumbagut. "Desakan kita kali ini tidak lagi dengan sistem barter energi. Karenanya manajemen Inalum diharapkan melihat persoalan krisis listrik di Sumut karena kebutuhan dasar masyarakat secara umum," kata Washington.

Diakui, upaya mendesak pasokan listrik dari Inalum itu sudah dibicarakan dengan Gubernur Sumut Rudolf M Pardede langsung kepada Direktur Utama (Dirut) PT Sumitomo (pemegang saham terbesar PT Inalum) dan Dirut PLN Eddie Widiono beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Humas PT Inalum S Sijabat mengaku belum mengetahui masalah kewajiban pasokan listrik ke PLN Sumbagut itu. "Saya tak tahu kalau Inalum diharuskan memasok listrik ke Sumut tanpa sistem barter," tutur Sijabat. (M Tampubolon)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

**Tossa Garap PLTU Rp 2,3 Triliun**

SEMARANG (Suara Karya): PT Tossa Shakti membuat gebrakan baru dengan menggarap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 15 megawatt (MW) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dana senilai Rp 2,3 triliun segera dikucurkan untuk investasi proyek kelistrikan tersebut.

Pembangunan PLTU ini dinilai strategis untuk memasok kebutuhan energi listrik yang sangat tinggi seiring perkembangan perekonomian di kawasan Pelabuhan Kendal. Project Manager PT Tossa Shakti Soebagyo menuturkan, pengembangan PLTU di Kendal sebagai langkah untuk mengantisipasi krisis energi listrik. Proyek yang digarap 2008 ini menempati lahan tambak ikan seluas 25 hektare yang sudah tidak produktif akibat diterjang abrasi.

Mengingat kawasan Pelabuhan Kendal kini semakin berkembang sebagai kawasan industri, maka keberadaan PLTU kelak juga bakal dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan industri lain yang akan dibangun di Kabupaten Kendal.

Ketua Tim Amdal dari PT Kalpataru Sejahteradi yang merupakan pendamping PT Tossa Shakti, Ari Nuryanto mengaku, pihaknya sudah menyusun dokumen amdal sebagai pelengkap perencanaan pembangunan PLTU yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan listrik untuk rencana proyek pembangunan wisata pantai dan proyek perluasan industri. (Pudyo Saptono)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    **JUL**    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2007

## Tunggak Pembayaran, Listrik STS Diputus

**PURWAKARTA, (PR).-**

Karena menunggak pembayaran selama satu bulan, aliran listrik ke pusat perbelanjaan terbesar di Kab. Purwakarta, Sadang Terminal Square (STS), diputus oleh PT PLN AJP Purwakarta.

"Ya sejak tanggal 2 Juli kemarin, aliran listrik ke STS untuk sementara dicabut karena mereka belum memenuhi kewajibannya. Padahal, kami (PT PLN AJP Purwakarta) sudah memberikan toleransi hingga akhir bulan, tapi belum juga mereka bayarkan," kata Kepala PLN AJP Purwakarta, Ir. Indra Sofnil dan Humas AJP Purwakarta, Ajat S., Rabu (4/7).

Meski tagihan rekening listrik dari daya listrik sebesar 951,5 KVA yang mereka gunakan dan bayarkan kepada PLN mencapai puluhan juta rupiah, aktivitas pusat perbelanjaan itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Karena aliran listrik dari PLN diputus, mereka (PT STS) menggunakan pembangkit listrik (disel) sementara untuk penerangannya.

Sejumlah pemilik toko di STS mengaku dengan adanya keputusan aliran listrik ini, usahanya menjadi terganggu. Pasalnya, daya listrik yang dihasilkan mesin genset terbatas tidak seperti halnya listrik dari PLN. "Sekarang ini harus ada pengaturan penggunaan listrik di los/kiosnya," ujar seorang pedagang.

Berkaitan dengan belum dibayarkannya bagi hasil dari STS, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta, Drs. H. Nana Narasa K.R., M.M. mengaku, setelah

membaca surat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab dan PT STS, ternyata tidak ada satu pun klausul yang menyebutkan bagi hasil sehingga kewajiban STS membayar bagi hasil otomatis gugur. Namun, yang ada dalam perjanjian itu adalah pembagian tempat usaha di mana Pemkab menerima bagian 10 persen dari kios yang ada serta mereka jual.

Seperti diberitakan harian ini, Komisi II DPRD mempertanyakan hingga sekarang dana bagi hasil dari pengelolaan Sadang Terminal Square (STS) oleh pihak swasta dari tahun 2005 sampai 2007 belum sepeser pun masuk ke kas Pemkab Purwakarta. Padahal, jumlah tagihan yang harus diterima Pemkab dari hak pengelolaan lahan oleh STS terbilang besar, yaitu Rp 697.044.520,86. Sementara itu, saat manajemen PT STS dihubungi melalui telepon, dua nomor telepon yang ada yaitu nomor 8220XXX dan 8220XXX tidak diperoleh jawaban.

Berdasarkan pengamatan "PR", pusat perbelanjaan terbesar dan termegah di Kabupaten Purwakarta sejak awal pendiriannya hingga sekarang menyisakan berbagai persoalan, mulai dari belum adanya terminal pengganti (Terminal Sadang) yang sekarang dijadikan pusat perbelanjaan, adanya karyawan PT STS yang dibayarkan hanya setengahnya dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya, adanya keresahan para pemilik toko yang disegel oleh manajemen dan terakhir, belum membayar bagi hasil kepada Pemkab sebesar Rp 700 juta. (A-86)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA				<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>							
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<b>JUL</b>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 10											TAHUN 200

## South Korea to send North oil in nuke shutdown deal

Jon Herskovitz  
*Reuters/Seoul*

South Korea will start shipping oil to North Korea next week, an official said Wednesday, a day after United Nations nuclear inspectors said the reclusive state had agreed to steps verifying a shutdown of its nuclear program.

Under a disarmament-for-aid pact reached in six-country talks in February, impoverished North Korea pledged to start closing its Soviet-era Yongbyon reactor in exchange for 50,000 tonnes of heavy oil from its neighbor.

Implementation of the deal was held up for months because of a standoff over North Korean funds frozen in a Macau bank. Pyongyang said it has received the money.

"The first shipment will start next week and the initial amount will be between

5,000 and 10,000 tonnes," a South Korean Unification Ministry official said.

South Korea started massive food aid to North Korea at the weekend, citing progress in the nuclear talks as the reason for resuming aid suspended last year after the North test-fired a volley of ballistic missiles.

Pyongyang has been able to win these concessions even though it missed a mid-April deadline to start shutting its reactor.

U.S. State Department spokesman Sean McCormack said on Tuesday Pyongyang wanted some of the oil before starting to close Yongbyon, and Washington was not opposed to such a shipment.

The International Atomic Energy Agency (IAEA), which sent officials to North Korea last week, said Pyongyang had agreed to measures to verify a shut-

down of the sprawling Yongbyon complex.

But a date has not yet been set to start closing down the state's source of weapons-grade plutonium.

The UN watchdog said the six countries in the talks — the two Koreas, China, Japan, Russia and the United States — must settle on a shutdown target date before it sends inspectors.

Pyongyang expelled the Vienna-based agency's inspectors in December 2002. It subsequently walked out of the nuclear Non-Proliferation Treaty, announced that it had atomic bombs and, last year, conducted its first nuclear test.

North Korean leader Kim Jong-il said in a meeting with China's foreign minister on Tuesday that all involved parties should take "initial actions" in the aid-for-disarmament deal, China's *Xinhua* news agency reported.

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

## Pemerintah Diminta Serahkan Pengelolaan Listrik pada Swasta

[MEDAN] Pemerintah lebih baik menyerahkan pengelolaan listrik kepada pihak swasta agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi. Saat ini, listrik padam selama delapan jam sampai sepuluh jam, setiap harinya. Akibatnya, usaha kecil menengah (UKM) banyak yang terancam bangkrut.

"Pemerintah lebih baik menyerahkan pengelolaan listrik ke pihak swasta. Soalnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah tidak bisa menangani persoalan listrik," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), Aulia Rahman, kepada *SP* di Medan, Rabu (4/7) pagi.

Selain itu, pemadaman oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu rawan dengan kebakaran. Berdasarkan data dari Dinas Pencegah Padam Kebakaran (P2K), selama bulan Juni 2007, sejak pemadaman mulai ter-

jadi, kebakaran di Medan, sedikitnya 14 kali terjadi. Jumlah kerugian diperkirakan lebih dari Rp 5,2 miliar.

Begitu juga dengan kerugian usaha kecil, ditotal mencapai triliunan rupiah. Aktivitas perusahaan swasta, kantor polisi, maupun lainnya, banyak terganggu akibat pemadaman tersebut. Sampai saat ini, PLN tidak mampu menangani hal tersebut, selalu beralasan pemadaman untuk perbaikan mesin.

Menurut Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hasrul Azwar, PLN merupakan sarang koruptor, yang tidak mungkin tak mampu membeli mesin baru. Selain itu, PLN pun dianggapnya tidak mungkin tak mempunyai dana untuk merenovasi mesin pembangkit listrik, atau membangun listrik tenaga air.

"Bohong bila ekonomi di daerah ini bisa meningkat mencapai 7 persen, sementara pemadaman sering terjadi.

Yang benar, perekonomian semakin anjlok akibat pemadaman listrik. Saat ini, masyarakat sudah kembali lagi ke zaman lalu, menghidupkan lilin di saat gelap," kata Hasrul.

Sementara itu, akibat pemadaman listrik oleh PLN, di Jl Sutomo II, Kecamatan Proklamasi II, Siantar Barat, Pematang Siantar, seorang pembantu rumah tangga (PRT) tewas terpengang. Kebakaran itu terjadi saat listrik sudah padam. Penyebab kebakaran diduga bersumber dari lilin yang menyala, jatuh kemudian menjilati benda yang rentan dengan api.

Hal yang sama juga terjadi di Jl GB Joshua Medan, seorang warga bernama Hartono (70) tewas karena menghirup asap mesin genset. Lima orang lainnya, keluarga Hartono, terjatuh tak sadarkan diri. Masyarakat langsung melarikan para korban ke Rumah Sakit Deli Jl Merbabu Medan. [AHS/W-8]

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

## Rencana investasi China di PLTU terganjal soal jaminan pemerintah

Oleh JOHN A. OKTAVERI  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Rencana pemerintah Cina untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan baku batu bara dengan kapasitas 10.000 megawatt (MW) di Indonesia masih terganjal masalah penjaminan dari pemerintah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah saat ini masih membahas masalah pembiayaan atas pembangunan PLTU tersebut.

Selain itu, masih diperlukan persamaan pandangan China dan Indonesia mengenai beberapa aturan terkait dengan pembangunan pembangkit listrik di Jawa tersebut.

"Wapres [Jusuf Kalla] masih memberikan waktu untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kedua negara soal pembangunan pembangkit itu,"

katanya sesuai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla membicarakan soal rencana pembiayaan proyek itu, kemarin.

Dia menyebutkan salah satu persoalan yang paling mendasar adalah masalah lingkup penjaminan yang akan diberikan pemerintah kepada bank pemberi pinjaman terutama soal kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendanai proyek itu.

### Belum tahu

Menurut Anggito, pemerintah China belum begitu mengetahui soal investasi di Indonesia. Berbeda dengan Jepang yang sudah membangun berbagai macam pembangkit listrik di Indonesia.

"Pemerintah China belum berpengalaman untuk mendanai proyek pembangkit listrik. Jadi memang butuh waktu untuk menyamakan persepsi tersebut.

Begitu juga posisi pemerintah berkaitan dengan proyek PLN."

Sebenarnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu itu menjelaskan, Indonesia selalu mengatakan PLN merupakan perusahaan yang 100% dimiliki pemerintah. Bila terjadi masalah di PLN terutama soal keuangan, pemerintah jelas ikut bertanggung jawab.

"Jadi masih ada kendala pengertian soal penjaminan. Padahal kami sudah mengatakan bahwa PLN itu milik pemerintah 100%. Begitu juga soal kesehatan BUMN itu dijamin pemerintah," katanya.

Dia menambahkan jaminan itu juga sebenarnya sudah ada di UU No. 19/2003 mengenai BUMN.

Pemerintah China juga meminta kepastian terhadap pasokan batu bara dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan pembangkit listrik tersebut.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

# PLTN Bisa Digantikan

## Ada Alternatif Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan pemerintah dengan menetapkan rencana suplai listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dengan target 4 persen pada tahun 2025 dapat digantikan dengan sumber energi lainnya. Sumber-sumber energi selain nuklir, terutama energi terbarukan, saat ini belum optimal digunakan.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi nuklir yang terlalu berisiko dan menimbulkan gejolak massa itu untuk pembangkit listrik.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Rinaldy Dalimi, selaku Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Rabu (4/7) di Jakarta.

"Teknologi nuklir memang harus dikuasai dan aplikasinya yang diutamakan untuk bidang kesehatan dan pertanian. Penerapan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia jangka 10 sampai 20 tahun ke depan belum memungkinkan," kata Rinaldy.

Dia mengemukakan, alasan penolakan penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, selain karena sumber energi lainnya tidak dikembangkan secara optimal, juga karena faktor ke-disiplinan yang relatif rendah. Padahal, produksi listrik dengan sumber energi nuklir itu sama sekali tidak boleh ada kesalahan karena dapat menimbulkan radiasi bahan radioaktif yang membahayakan kesehatan seseorang

seumur hidupnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Masyarakat Antinuklir Indonesia (Manusia) Dian Abraham. Menurut dia, pemerintah atau institusi seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tidak boleh mengabaikan dampak kecelakaan pembangkit tenaga nuklir.

### Energi baru

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kebutuhan listrik nasional tahun 2025 akan dicukupi dengan batu bara (33 persen), gas (30 persen), bahan bakar minyak (20 persen), serta energi baru dan terbarukan (17 persen).

Sumber energi nuklir masuk dalam kategori energi baru. Sumber energi terbarukan meliputi bahan bakar nabati yang ditargetkan 5 persen, juga panas bumi (5 persen). Kemudian batu bara cair ditargetkan 2 persen. Se-

lebihnya, 1 persen, berasal dari sumber energi matahari, air, angin, dan biomassa.

Menurut Rinaldy, suplai 4 persen listrik dari energi nuklir itu dapat digantikan dengan produk-

si listrik dari sumber energi terbarukan atau dari batu bara. Sejauh ini sumber energi batu bara memang penyumbang terbesar pencemaran udara karena emisi karbondioksida (CO<sub>2</sub>).

Indonesia belum mengembangkan teknologi mengurangi pencemaran itu, misalnya dengan teknologi penangkap emisi atau meningkatkan kualitasnya menjadi bahan bakar batu bara cair yang lebih kecil pencemarannya.

"Juga dari sumber energi terbarukan yang teknologinya akan berkembang pesat, seperti teknologi modul surya yang dikombinasikan dengan temuan baterai dengan kapasitas penyimpanan listrik yang tinggi," kata Rinaldy.

Data Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menunjukkan, pada tahun 2026 kebutuhan listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) sebesar 327 terawatt jam (TWh)-10 pangkat 12, dengan beban puncak mencapai 59 gigawatt (GW).

### Kesalahan prosedur

Dian Abraham mengemukakan, teknologi nuklir yang bakal dibangun untuk pembangkit listrik tersebut membawa risiko secara massal seumur hidup sehingga dalam penetapannya perlu persetujuan publik. Menurut dia, ada kesalahan prosedur dalam penetapan pembangunan PLTN selama ini.

"Persetujuan publik bukan hanya pada penerapan teknologi pengelolaan limbah nuklirnya, tetapi seharusnya pada penetapan butuh PLTN atau tidak. Kalau memang butuh, barulah ditetapkan lokasi maupun teknologi-teknologinya," kata Dian. Menurut dia, pemerintah sering mengabaikan dampak kecelakaan nuklir pembangkit listrik di Chernobyl, Ukraina, dengan menyatakannya kecelakaan itu hanya mereganggutkan puluhan jiwa. (NAW)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007



LAYANAN ON-LINE : Grand Launcing layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening listrik secara on-line melalui kantor pos tampak dilakukan bersama-sama antara pihak PT PLN dan PT POS, tampak dari kiri ke kanan, General Manager PLN Distribusi Jabar Banten Murtaqi Syamsudin, Direktur Keuangan Bisnis Komunikasi PT POS San Herib, Direktur Niaga Pelayanan Pelanggan PT PLN Sunggu Aritonang dan Kepala Unit Bisnis Jasa Keuangan PT POS Ida Bagus Numantara memijit tombol bersama, di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (4/7).

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

## Untuk genjot pendapatan Jababeka bangun PLTG

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT Jababeka Tbk sedang menjajaki pinjaman Rp1 triliun guna membangun pembangkit tenaga listrik tenaga gas (PLTG) 130 MW di kawasan III Jababeka Rp1,4 triliun guna mendongkrak pendapatan menjadi Rp600 miliar.

Selain mencari pinjaman ke bank, perseroan juga sedang memikirkan alternatif pembiayaan lain guna membiayai proyek tersebut yakni penawaran saham terbatas (*rights issue*) dan penerbitan surat utang.

"Kami belum bisa memutuskan akan mengambil alternatif pembiayaan yang mana. Saat ini, kami masih dalam pembicaraan internal," kata Corporate Secretary Jababeka Muljadi Suganda, kemarin.

Namun, Jababeka berharap segera berhasil mendapatkan pinjaman dari bank, baik bank lokal maupun bank asing.

"Kemungkinan besar pendanaan *power plant* dari bank, bisa bank lokal atau bank asing. Bulan lalu, kami sudah memberikan proposal di beberapa bank lokal. Diperkirakan skema pinjaman akan selesai pada Agustus 2007 dan bisa langsung cair."

Sekitar 25% dari pembiayaan pembangunan tenaga listrik tersebut, yang diperkirakan rampung dibangun pada 2009, diambil dari kas internal perseroan.

"Perseroan sudah mengantongi izin, sehingga akan segera dimulai pembangunannya tahun ini," ujarnya.

Pembangkit listrik merupakan sarana pendukung kawasan Jababeka baru yang sedang dikembangkan, selama ini pasokan listrik kawasan in-

### Kinerja keuangan Jababeka (Rp miliar)

	2006	2005
Penjualan	Rp429,96	567,36
Beban pokok penjualan	241,74	306,72
Laba usaha	51,89	142,85
Laba (rugi) bersih	37,02	133,99
Laba bersih per saham (Rp)	2,69	9,72

Sumber: Laporan keuangan Jababeka

\*) Setelah ditambah hasil penjualan lahan Jababeka di Cilegon, Jawa Barat, ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp187 miliar pada 2005.

dustri Jababeka I dan II masih dipasok oleh PT Cikarang Listrikindo.

"Untuk pengembangan kawasan industri di kawasan III, yang memiliki luas lahan 240 hektare, diperlukan juga penyediaan tenaga listrik untuk penghuninya, kami akan mengambil pangsa pasar pembangkit listrik kawasan III jadi di sana tidak dipasok Cikarang listrikindo," katanya.

Selain mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) untuk pemba-

ngunan *power plant*, perseroan juga menganggarkan *capex* reguler Rp20 miliar-Rp40 miliar dari kas internal di mana 25% dari belanja modal itu digunakan perseroan untuk membeli lahan melengkapi lahan kawasan Jababeka.

"Ada kluster yang belum kami beli jadi

kawasan Jababeka yang kami miliki seluas 1.570 hektare, sehingga masih agak bolong-bolong."

Sementara itu, Jababeka menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih 2007 masing-masing naik 15% dari perolehan tahun lalu yang hanya Rp429,96 miliar dan Rp37,02 miliar.

Pada akhir tahun ini perseroan berharap dapat membukukan pendapatan dan laba bersih konsolidasi sebesar Rp494,45 miliar dan Rp42,57. (08)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2007

# Proyek 10.000 MW Terkendala

**JAKARTA (SINDO)** – Pelaksanaan proyek PLTU 10.000 MW masih terkendala kepastian penjaminan yang diminta konsorsium China atas kredit ekspor yang akan diberikan bagi PLN.

Masalah terjadi karena pemerintah Indonesia menilai telah cukup memberikan penjaminan yang diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 71/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Kita akan secepatnya menyamakan persepsi dulu bagaimana posisi pemerintah sehubungan dengan proyek PLN. Kita Selalu mengatakan bahwa pemerintah adalah pemegang saham 100%. Jadi kalau ada

masalah kesehatan keuangan PLN, itu menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Dep-keu) Anggito Abimanyu sesuai rapat dengan Wakil Presiden (Wapres) membahas proyek PLTU 10.000 MW di Istana Wapres, Jakarta,

Anggito mengaku, penjaminan menjadi salah satu masalah yang cukup krusial selain masalah ketersediaan bahan

baku batu bara yang menjadi pembahasan dalam rapat yang dipimpin langsung Wapres.

Akibat belum ada kesamaan pandangan tentang penjaminan, hingga kini China belum menyepakati kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam proyek PLTU 10.000 MW.

Padahal, lanjut dia, berdasarkan Perpres 71/2006 dan PMK, pemerintah memberikan lingkup penjaminan secara lengkap, termasuk penjaminan kesehatan keuangan PLN dan penyediaan pasokan batu bara. Perpres dan PMK dinilai merupakan jaminan nyata pemerintah atas proyek ini.

Pemerintah bahkan menjanjikan, jika ke depan ada kebijakan yang mengakibatkan keuangan PLN terganggu, hal itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perihal pembiayaan dalam proyek senilai Rp200 triliun ini, tutur dia, antara lain berasal dari internal PLN, kredit ekspor, dan sumber lain. PLN pun dinilai mampu untuk melaksanakan proyek ini. Hal ini karena PLN memiliki obligasi rupiah dan valuta asing dan pemerintah sudah memberikan jaminan dalam bentuk public services obligation (PSO) dan PMK.

Wapres, kata Anggito, meminta untuk segera dilakukan pendekatan dan penjelasan kepada China bahwa pemerintah menjamin PLN sebagai pelaksana proyek PLTU 10.000 MW, sehingga tidak perlu ragu untuk membantu pendanaannya. Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan asal China banyak memenangkan tender PLTU dari PLN.

"China ini kan belum tahu soal Indonesia, tidak seperti Jepang yang sudah melakukan pembangunan berbagai macam power plant di Indonesia, sedangkan China belum pernah. Jadi tentu kita akan secepatnya menyamakan persepsi dulu bagaimana posisi pemerintah sehubungan dengan proyek PLN," kata dia.

(nurmayanti)



SINDO/AZIZ/INDRA

**PLTU 10.000 MW**

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyalami para peserta rapat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 MW di Istana Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Rapat tersebut dihadiri Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menperin Fahmi Idris, dan Dirut PLN Eddie Widiono.